

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. Origin of SARS-CoV-2 [Internet]. WHO; 2020 [cited 2021 17 Januari]. Available from: WHO/2019-nCoV/FAQ/Virus_origin/2020.1.
2. World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Internet]. WHO; 2021 [cited 2021 19 Maret]. Available from: covid19.who.int.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (Covid-19) Data Dilaporkan Sampai 14 Maret 2021 [Internet]. 2021. Available from: <http://covid19.kemkes.go.id>
4. World Health Organization. Addendum to Fact Sheet 15 on National Implementation Measures for the International Health Regulations 2005 (IHR) : COVID-19 as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) under the IHR: VERTIC The Green House 244-254 Cambridge Heath Road London E2 9DA Inggris Raya 2020.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. COVID-19 Dalam Angka Kondisi 19 September 2020 [Internet]. 2020. Available from: www.kemkes.go.id.
6. Purwanto EA, Emilia O. New Normal Sebagai Jalan Tengah? : Kesehatan vs Ekonomi dan Alternatif Kebijakan dalam Pandemi COVID-19. New Normal : Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19. 2020:35-52.
7. Fadilah M, Pariyana, Syakurah RA, Aprilia S. Evaluasi Kepatuhan Masyarakat dalam menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru Berdasarkan *Health Beliefs Model*. Seminar Nasional AVoER XII 2020. 2020.
8. Utami RA, Mose RE, Martini. Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kesehatan Holistic. 2020;4(2).
9. Toyfur MF, Agustien M, Permata DY. Penyuluhan Aman Menggunakan Transportasi Umum Era New Normal Pada Penggunaa Angkutan Umum di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Seminar Nasional AVoER XII 2020 2020.

10. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Padang: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 2020.
11. Kominfo Kota Bukittinggi. Akhiri Pemberlakuan PSBB, Pemko Akan Lakukan Pelonggaran Bertahap [Internet]. Bukittinggi: Kominfo Kota Bukittinggi; 2020 [cited 2021 6 Januari]. Available from: bukittinggi.go.id/berita.
12. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bukittinggi. Laporan Kegiatan COVID-19 Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi; 2020.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat. Update Kasus COVID-19 di Sumatera Barat [Internet]. 2020 [cited 2021 19 Maret]. Available from: corona.sumbarprov.go.id.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat. Data Pantauan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat [Internet]. 2021 [cited 2021 19 Maret]. Available from: corona.sumbarprov.go.id.
15. Polres Bukittinggi. Rekap Giat Ops Yustisi Polres Bukittinggi. Bukittinggi: Polres Bukittinggi, 2021.
16. Kadji Y. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press; 2015.
17. Wang W, Tang J, Wei F. Updated Understanding of The Outbreak of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in Wuhan, China. *Journal of Medical Virology*. 2020.
18. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 : Revisi 5. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
19. Rothan HA, Byrareddy SN. The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak. *Journal of Autoimmunity*. 2020.
20. Shereena MA, Khana S, Kazmic A, Bashira N, Siddiquea R. COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses *Journal of of Advanced Research*. 2020:91-8.
21. PROKAMI Kota Depok. Bunga Rampai Covid-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat #Dirumahaja. Depok: PROKAMI; 2020.

22. World Health Organization. Public Health Surveillance For Covid-19 [Internet]. WHO; 2020. Available from: WHO/2019-nCoV/SurveillanceGuidance/2020.7.
23. Kementerian Kesehatan RI. Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus COVID-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
24. Badan Pusat Statistika. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19. Jakarta: BPS RI; 2020.
25. Aknolt KP. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ilmiah Hubungan Internasional - PACIS*. 2020;59-64.
26. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 2009.
27. BPS Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi; 2021.
28. Suwena IK, Widyatmaja IGN. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Pustaka Larasan; 2017.
29. Isdarmanto. *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara; 2017.
30. Dunn WN. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi 3*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta; 2003.
31. Winarno B. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo; 2013.
32. Handoyo E. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya; 2012.
33. Kadi N, Khelfaoui M. Population Density, A Factor in The Spread of COVID-19 in Algeria: Statistic Study. *Bulletin of The National Research Centre*. 2020;44(1).
34. Nugroho R. *Public Policy*. Jarkarta: PT. Elex Media Komputindo; 2008.
35. Purwanto EA, Sulistyastuti DR. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media; 2012.
36. Wahyuni T. Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik* 2020;16(2).
37. Ningsih DS. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Makanan Dan Minuman Di

- Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 [Skripsi]. Padang: Universitas Andalas; 2019.
38. Abraham R. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Puskesmas Kamonji Kota Palu. *Katalogis*. 2018;6(5):118-23.
 39. Rawung DJ. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Palu (Studi Pusat Kesehatan Masyarakat). *Katalogis*. 2017;5(12):138-44.
 40. Massi R. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Pusat Kesehatan Talise Kota Palu *Jurnal Katalis*. 2016;4(4):1-13.
 41. Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo; 2014.
 42. Moleong LJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2018.
 43. Satori Da, Komariah A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2013.
 44. Hasbiansyah O. Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator* 2008;9(1).
 45. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2010.
 46. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. *Data Kunjungan TMSBK Berdsarkan Karcis/Brizzi*. Bukittinggi: Disarpورا Kota Bukittinggi, 2020.
 47. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Bukittinggi (RPIJM) 2017-2021*. Bukittinggi: Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi; 2017.
 48. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Buku Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2019-2023*. Bukittinggi: BPBD Kota Bukittinggi; 2019.
 49. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga*. Bukittinggi: Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi; 2016.
 50. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. *Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi*. Bukittinggi: Disarpورا Kota Bukittinggi; 2020.

51. Satpol PP Kota Bukittinggi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP Tahun 2020. Bukittinggi: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi; 2021.
52. Polres Bukittinggi. Profil Polres Kota Bukittinggi [Internet]. Bukittinggi: Humas Polres Kota Bukittinggi; 2021 [cited 2021 23 April]. Available from: bukittinggi.sumbar.polri.go.id/.
53. Silalahi U. Komunikasi Pemerintahan : Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik. 2004;3(1):36-54.
54. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 2007.
55. Mugni A, Harjoni. Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan Penghapusan *Human Trafficking* di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Komunikasi ULTIMACOMM. 2020;12(1).
56. Hasibuan H, Yusnadi, Purba S. Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan. 2016;3(2).
57. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 2011.
58. Sukowati NP, Hadi M, Rengu SP. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). Jurnal Administrasi Publik. 2013;1(6):1195-12-2.
59. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Objek Wisata. Bukittinggi: Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi; 2016.
60. Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata. Instruksi Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Nomor: 556/01/Diparpورا-Destinasi/II/2021 tentang Pengendalian dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Objek Wisata Pedestrian Jam Gadang dan Taman Panorama Lobang Jepang Kota

Bukittinggi Tahun 2021 Kota Bukittinggi: Disparpora Kota Bukittinggi; 2021.

61. Ratri DK. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2014.
62. Walikota Bukittinggi. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Bukittinggi: Walikota Bukittinggi; 2020.
63. Setyawan D, Srihardjono NB. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*. 2016;6(2).



